BADAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ROTE NDAO

POHON KINERJA TAHUN 2022

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN

MISI

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Persentase SILPA terhadap APBD
3. Penetapan APBD
4. Persentase Pengelolaan Aset Daerah

SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase Pelayanan Surat Menyurat
2. Prosentase Pemeliharaan Peralatan Kantor
3. Prosentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
4. Prosentase Penyusunan Anjab, ABK dan SOP
5. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Prosentase Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah
7. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Prosentase Penyaluran Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Belanja Tidak Terduga
9. Jumlah dokumen Renja, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA PD, dan Perubahan DPA PD
10. Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPPD dan LKPJ)
11. Jumlah dokumen Evaluasi LKIP Semesteran, LKIP, dan Evaluasi Renja per triwulan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase Pelayanan Surat Menyurat
2. Prosentase Pemeliharaan Peralatan Kantor
3. Prosentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
4. Prosentase Penyusunan Anjab, ABK dan SOP
5. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN DAN ASET)

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah
2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Prosentase Penyaluran Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Belanja Tidak Terduga

PERENCANA (SUB KOORDINATOR SUBSTASI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN)

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah dokumen Renja, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA PD, dan Perubahan DPA PD
2. Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPPD dan LKPJ)
3. Jumlah dokumen Evaluasi LKIP Semesteran, LKIP, dan Evaluasi Renja per triwulan

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase SILPA terhadap APBD
2. Jumlah Produk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Jumlah Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
4. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen penerbitan SKPP
5. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji
6. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
7. Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
8. Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
9. Jumlah Dokumen Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
3. Jumlah laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
4. Jumlah laporan Analisis Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD
5. Jumlah data Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
6. Jumlah Koordinasi dan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota
7. Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi pemerintah Daerah

KEPALA BIDANG ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Penetapan APBD
2. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
3. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
4. Jumlah Dokumen RKA SKPD
5. Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD
6. Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda dan 1 Perbup)
7. Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1 Perda dan 3 Perbup)
8. Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
9. Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja
10. Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
11. Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
12. Jumlah Data dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
13. Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

KEPALA BIDANG ASET DAERAH

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Pengelolaan Aset Daerah
2. Jumlah Koordinasi dan tersusunnya Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
3. Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah
4. Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah
5. Jumlah dokumen Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
6. Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
7. Jumlah Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtangan Barang Milik Daerah
8. Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
9. Jumlah dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
10. Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
11. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase SILPA terhadap APBD

KEPALA SUB BIDANG REKONSILIASI DAN PEMBINAAN AKUNTANSI

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

KEPALA SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN ANGGARAN

KEPALA SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS

KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Pengelolaan Aset Daerah

2. Jumlah Produk Surat Perintah Pencaiaran Dana (SP2D)
3. Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase SILPA terhadap APBD
2. Jumlah Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
4. Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5. Jumlah Dokumen Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGELOLAAN GAJI)

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase SILPA terhadap APBD
2. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen penerbitan SKPP
3. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Jumlah laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
3. Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi pemerintah Daerah

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BENDAHARA UMUM DAERAH

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah
2. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
3. Jumlah data Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Penetapan APBD
2. Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
3. Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAAN ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Penetapan APBD
2. Jumlah Dokumen RKA SKPD
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD
4. Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda dan 1 Perbup)
5. Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1 Perda dan 3 Perbup)
6. Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
7. Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja
8. Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2. Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah
3. Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah
4. Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENGAMANAN ASET

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Pengelolaan Aset Daerah
2. Jumlah Koordinasi dan tersusunnya Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
3. Jumlah dokumen Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
4. Jumlah dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5. Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Baa, 20 Januari 2022

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina Tk. I
Nip. 19710518 200604 1 003